



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



## MODUL 6

# Dinamika Historis dan Pentingnya Wawasan Nusantara

Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan



Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pengantar : Pendidikan kewarganegaraan  
Dinamika Historis dan Pentingnya  
Wawasan Nusantara  
Kode mate kuliah : RMIK101  
Tanggal mulai : 23 Januari 2022

## **Dinamika Historis dan Pentingnya Wawasan Nusantara**

### Modul 6



Niko Tesni Saputro  
Alfian Eka Pradana

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,  
Yogyakarta, Indonesia

## **Kata Pengantar**

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi dan sekaligus wawasan nasional bangsa Indonesia. Sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan memdeskripsikan kembali konsep Wawasan Nusantara baik secara tulisan maupun lisan. Setelah melakukan pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, dan pentingnya Wawasan Nusantara. Anda juga mampu mengevaluasi dinamika historis, pentingnya Wawasan Nusantara dan mampu menyajikan hasil kajian perseorangan mengenai suatu kasus terkait dinamika historis, dan pentingnya Wawasan Nusantara

Yogyakarta, 23 Januari 2022

Tim Penyusun

## Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran .....	4
2. Bahan Kajian .....	4
3. Tujuan Pembelajaran .....	4
4. Luaran .....	4
5. Dinamika Historis dan Wawasan Nusantara.....	5
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara.....	5
B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara.....	7
C. Dinamika dan Tantangan Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa- Negara Indonesia	9
D. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara .....	9
6. Latihan .....	14
7. Referensi .....	15
8. Lembar Catatan Pembelajaran.....	16

## 1. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami konsep dinamika historis dan memahami pentingnya wawasan nusantara sebagai kosepsi dan pandangan kolektif bangsa Indonesia dalam konteks pergaulan dunia

## 2. Bahan Kajian

- a. Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara
- b. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara
- c. Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa – Negara Indonesia
- d. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

## 3. Tujuan Pembelajaran

### a. Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami konsep dinamika historis dan memahami pentingnya wawasan nusantara sebagai kosepsi dan pandangan kolektif bangsa Indonesia dalam konteks pergaulan dunia

### b. Tujuan Instruksional Khusus

- 1.) Peserta didik mengerti dan memahami konsep dinamika historis dan pentingnya wawasan nusantara
- 2.) Peserta didik diharapkan mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, dan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia.
- 3.) Peserta didik mampu mengevaluasi dinamika historis, pentingnya Wawasan Nusantara
- 4.) Peserta didik mampu menyajikan hasil kajian perseorangan dengan Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

## 4. Luaran

- a. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep Dinamika Historis secara umum.
- b. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep wawasan nusantara
- c. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan sejarah dan perkembangan sistem klasifikasi dan kodefikasi penyakit dan masalah terkait kesehatan yang berlaku di dunia hingga yang berlaku di Indonesia

## 5. Dinamika Historis dan Wawasan Nusantara

### A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara

Sebagai konsep, istilah Wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut.

No	Tokoh/Lembaga	Wawasan Nusantara
1	Hasnan Habib	Kebulatan wilayah nasional, termasuk salah satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam
2	Wan Usman	Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam
3	Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1998	Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4	Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999	Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional

Wawasan nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun, demikian timbul pertanyaan apa arti wawasan nusantara dan apa pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata wawas (Bahasa Jawa) yang artinya pandangan. Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau atau

kepulauan, sedangkan dalam Bahasa latin kata lusa berasal dari katanaesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Kata kedua yaitu “antara” memiliki padanan dalam Bahasa latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. “antara” juga mempunyai makna yang samadengan kata inter dalam Bahasa inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam Bahasa sanksekerta. Kata “antara” dapat diartikan sebagai laut.

Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau. Antaranya berate diapit atau berada ditengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau beradaditengah benua atau samudra (pasha, 2008) tersebut dikemukakan. “Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan wawasan nusantara padadasarnya digunakan sebagai jembatan penghubung dan pemersatu bagi wawasan localyang terdapat disetiap daerah atau geografis nusantara. Jadi, wawasan local pada dasarnya boleh berbeda dengan wawasan nasional, namun harus ada jembatan yang harus menghubungkan kedua wawasan tersebut. Selanjutnya, wawasan local tidak boleh bertentangan dengan wawasan nasional, dalam arti tidak boleh keluar dari konteks wawasan nasional. Perbedaan wawasan local dengan wawasan nasional harus diartikan sebagai variasi dankekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang diangkat dari keanekaragaman budaya yang ada. Secara demikian, munculnya wawasan nasional merupakan resultane (hasil) dari interaksi wawasan local yang beraneka ragam.

## B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara

Terdapat sumber historis (sejarah), sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya wawasan nusantara.

### 1. Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari perdana menteri Ir. H. Djuanda kartawidjaja yang pada tanggal 13 desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai deklarasi Djuanda Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut territorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang mengubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis tutorial yang baru iini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah.

Sebelum keluarnya deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada *Territorial Zee En Maritime Kringen Ordinantie* 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama ordonasi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah hindia-belanda. Isi ordonasi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat.

Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undang nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar deklarasi Djuanda ini ke forum international agar dapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional.

## 2. Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara

Berdasar sejarah, wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Djuanda 1957 sebagai perubahan atas ordonasi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring tuntunan perkembangan, konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam urusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti lainnya konsep wawasan nusantara juga dilator belakang oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Hal diatas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjanjahan yang memecah belah bangsa, telah melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad-tekad orang wilayah dinusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia.

## 3. Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara

Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.

Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

#### C. Dinamika dan Tantangan Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Negara Indonesia

Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan.

Wawasan nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masalah penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan pelestarian di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubandari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya.

#### D. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. John Locke memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Seiring dengan perkembangan zaman yang menjadi batu loncatan dalam hal pengembangan, pemantapan, pendewasaan kajian ilmu tentang sistem demokrasi dan hak asasi manusia

memicu terjadinya peristiwa yang penting sebagai berikut.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan nusantara adalah “kesatuan wilayah dan persatuan bangsa” Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya Anda telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, dimana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung

Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain:

- a. Bercirikan negara kepulauan (*Archipelago State*) dengan jumlah 17.508 pulau.
- b. Luas wilayah 5.192 juta km<sup>2</sup> dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km<sup>2</sup> dan laut seluas 3.166 juta km<sup>2</sup>. Negara kita terdiri 2/3 lautan perairan
- c. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km
- d. Terletak diantara dua benua dan dua samudra (posisi silang)
- e. Terletak pada garis katulistiwa
- f. Berada pada iklim tropis dengan dua musim.
- g. Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan sirkumpasifik
- h. Berada pada 60 LU- 110 LS dan 950 BT – 1410 BT
- i. Wilayah yang subur dan *habitable* (dapat dihuni)
- j. Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam

Wawasan nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Cobalah anda kemukakan mengapa bangsa Indonesia yang beragam ini harus kita pandang sebagai satu kesatuan?

Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni:

1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS, 2010)
2. Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)

3. Memiliki keragaman ras
4. Memiliki keragaman agama
5. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa

Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik Memiliki makna:
  - a) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
  - b) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya.
  - c) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
  - d) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan
  - e) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - f) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
  - g) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut

tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi Memiliki makna:
  - a) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
  - b) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
  - c) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya Memiliki makna:
  - a) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
  - b) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan Memiliki makna:
  - a) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
  - b) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Berdasar uraian di atas, wawasan nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh.

## 6. Latihan

### Praktik Kewarganegaraan

Bacalah dengan seksama sebuah pemberitaan dari media terkait materi modul 6

Selasa, 11 Februari 2014 | 12:39

**TNI Investigasi Nelayan Indonesia yang Ditangkap Papua Nugini**

Jakarta- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Moeldoko mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi terhadap tertangkapnya nelayan Merauke di Papua Nugini. Setelah mengetahui duduk perkaranya, pemerintah kata Moeldoko, bisa mengajak Papua Nugini duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan komunikasikan, kita harus tahu persis titik kejadiannya bagaimana, apakah di perbatasan, atau di wilayah mereka, lalu kenapa harus pakai kekerasan seperti itu. Itu harus didalami," demikian kata Moeldoko saat ditemui di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Hal itu disampaikan Moeldoko menyusul adanya warga Merauke yang ditengarai nelayan memasuki perairan Papua Nugini. Belakangan diketahui mereka diproses marinir setempat dan ditengarai mendapatkan tindakan kekerasan dan hingga saat ini belum diketahui nasibnya.

"Pasti akan lanya, ini area politik atau pertahanan. Kalau area pertahanan, domain saya. Kalau berpolitik, nanti menlu (menteri luar negeri) yang protes," kata dia lagi ketika ditanya rencana pengecekan ke Papua.

Moeldoko menambahkan, wilayah Nusantara memang sangat luas sehingga kekuatan TNI kadang kala tidak selalu siap sedia mengecek bagian perairan. Kata dia, wajar jika terjadi kebobolan. Namun demikian, Moeldoko optimistis pengawasan perairan bisa makin ketat dengan adanya kapal selam yang rencananya dibeli dari Korea Selatan dan Inggris. "Nanti kekuatan bertambah," tambahnya.

Penulis: Ezra Natalyn/YS

Sumber : <http://www.beritasatu.com/nasional/165635-tni-investigasi-nelayanindonesia-yang-ditangkap-papua-nugini.html>

Selanjutnya, diskusikan dengan kelompok Anda untuk menjawab pertanyaan berikut:

- a) Apa sebenarnya kasus yang tengah dihadapi nelayan Papua berdasar pemberitaan di atas?
- b) Apa kemungkinan latar belakang penyebab nelayan sering dianggap melanggar batas wilayah perairan sebuah negara?
- c) Menurut anda apakah wilayah negara RI juga rentan terhadap masuknya kapal dan nelayan asing? Mengapa demikian?
- d) Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, secara politik dan pertahanan, dalam mengawasi kedaulatan wilayah negara?
- e) Menurut Anda, sudah cukupkah apabila pemerintah Indonesia mengajukan protes terhadap Papua Nugini terkait insiden di atas?
- f) Dalam konteks wawasan nusantara, kasus tersebut merupakan peluang ataukah tantangan?

Hasil jawaban kelompok dipresentasikan untuk mendapat tanggapan kelompok lain

## 7. Referensi

- Al-Hakim, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*.  
Malang: Madani
- Darmadi, H. 2016. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*.  
Pontianak: Alfabeta
- Senio, Rianar. 2020. “Dinamika Historis, dan Urgensi Wawasan Nusantara Sebagai Konsep dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia” *DINAMIKA HISTORIS, DAN URGENSI WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI DAN PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA DALAM KONTEKS PERGAULAN DUNIA* – rianarsenio (wordpress.com). Diakses pada 24 Januari 2022  
Jam 01.11

8. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampuan	Tanda tangan pengampu
1				
2				
3				
4				
5				

Nilai Akhir: \_\_\_\_\_

Pengampu,



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



## MODUL 7

# Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia

Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan



Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

**HANYA UNTUK  
PENGUNAAN INTERVAL**

Pengantar : Pendidikan kewarganegaraan  
pandangan kolektif kebangsaan  
indonesia dalam konteks pergaulan  
dunia

Kode mata kuliah : RMIK101

Tanggal mulai : 1 Februari 2022

## **Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia**

Modul 7



Niko Tesni Saputro

Alfian Eka Pradana

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,  
Yogyakarta, Indonesia

## **Kata Pengantar**

Pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia saling berkaitan dengan wawasan nusantara. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Yogyakarta, 1 Februari 2022

Tim Penyusun

## Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran.....	4
2. Bahan Kajian.....	4
3. Tujuan Pembelajaran.....	4
4. Luaran .....	4
5. Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia .....	5
A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik.....	5
B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi.....	5
C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya .....	6
D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan.....	6
6. Latihan .....	6
7. Referensi .....	8
8. Lembar Catatan Pembelajaran .....	9

## 1. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.

## 2. Bahan Kajian

- a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik
- b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
- c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
- d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan

## 3. Tujuan Pembelajaran

### a. Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.

### b. Tujuan Instruksional Khusus

- 1) Peserta didik dapat memahami perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik
- 2) Peserta didik dapat memahami perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
- 3) Peserta didik dapat memahami perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
- 4) Peserta didik dapat memahami perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan

## 4. Luaran

- a. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.
- b. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

## 5. Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia

Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, social budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, social budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan.

### A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Memiliki makna:

- 1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- 2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- 3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- 4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan
- 5) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
- 7) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

### B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Memiliki makna:

- 1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Memiliki makna:

- 1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- 2) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Memiliki makna:

- 1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- 2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

## 6. Latihan

- a) Wawasan nusantara pada hakikatnya merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Jelaskan bagaimana pentingnya wawasan nusantara dalam konteks pergaulan dunia?
- b) Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah. Jelaskan aspek trigatra dalam wawasan nusantara!
- c) Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Berdasarkan hal tersebut jelaskan aspek pancagatra dalam wawasan nusantara!
- d) Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Jelaskan implementasi wawasan nusantara dalam bidang ipoleksosbudhankam bagi bangsa Indonesia!
- e) Pada hakikatnya implementasi wawasan nusantara menuntut peran warga negara yang menunjang perwujudan kesejahteraan dan keutuhan wilayah NKRI. Jelaskan perwujudan peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik Indonesia!

## 7. Referensi

- Senio, Rianar. 2020. “Dinamika Historis, dan Urgensi Wawasan Nusantara Sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia” *DINAMIKA HISTORIS, DAN URGENSI WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI DAN PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA DALAM KONTEKS PERGAULAN DUNIA* – rianarsenio (wordpress.com). Diakses pada 1 Februari 2022 Jam 16.37.
- Ahadinata, Novan. 2018. “Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia”. [https://www.academia.edu/38005122/WAWASAN\\_NUSANTARA\\_SEBAGAI\\_KONSEPSI\\_DAN\\_PANDANGAN\\_KOLEKTIF\\_KEBANGSAAN\\_INDONESIA\\_DALAM\\_KONTEKS\\_PERGAULAN\\_DUNIA\\_Disusun\\_oleh](https://www.academia.edu/38005122/WAWASAN_NUSANTARA_SEBAGAI_KONSEPSI_DAN_PANDANGAN_KOLEKTIF_KEBANGSAAN_INDONESIA_DALAM_KONTEKS_PERGAULAN_DUNIA_Disusun_oleh). diakses pada 1 Februari 2022 Jam 16.49.

8. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan Pengampuan	Tanda Tangan Pengampu
1				
2				
3				
4				
5				

Nilai Akhir : \_\_\_\_\_

Pengampu,



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



## MODUL 8

# Demokrasi dan HAM

Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan



Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pengantar : Pendidikan kewarganegaraan  
Demokrasi dan HAM  
Kode mate kuliah : RMIK101  
Tanggal mulai : 23 Januari 2022

**HANYAUNTUK  
PENGUNAANINTERNAL**

## **Demokrasi dan HAM**

Modul 8



Niko Tesni Saputro  
Alfian Eka Pradana

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,  
Yogyakarta, Indonesia

## **Kata Pengantar**

Pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia saling berkaitan dengan wawasan nusantara. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satukesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Yogyakarta, 23 Januari 2022

Tim Penyusun

## **Daftar Isi**

1. Capaian Pembelajaran .....	4
2. Bahan Kajian .....	4
3. Tujuan Pembelajaran .....	4
4. Luaran .....	5
5. Uraian Materi Konsep Konsep Demokrasi.....	5
a. Konsep- Konsep Demokrasi.....	5
b. Demokrasi Konstitusional .....	5
c. Demokrasi Rakyat .....	6
d. Demokrasi Nasional (National Democratic State) .....	6
6. Latihan .....	8
7. Referensi .....	9
8. Lembar Catatan Pembelajaran.....	10

1. Capaian Pembelajaran
  - a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep Demokrasi
  - b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep demokrasi rakyat dan demokrasi nasional
2. Bahan Kajian
  - a. Konsep Konsep Demokrasi
  - b. Demokrasi Konstitusional
  - c. Demokrasi rakyat
  - d. Demokrasi nasional
3. Tujuan Pembelajaran
  - a. Tujuan Instruksional Umum  
Peserta didik mampu memahami konsep demokrasi dan macam- macam demokrasi
  - b. Tujuan Instruksional Khusus
    - 1.) Peserta didik mengerti dan memahami konsep Demokrasi
    - 2.) Peserta didik mengerti dan memahami jenis jenis Demokrasi
    - 3.) Peserta didik mengerti dan memahami demokrasi konstitusional.
4. Luaran
  - a. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep dan prinsip Demokrasi secara umum
  - b. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep demokrasi kontitusinal.
  - c. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep demokrasi rakyat
  - d. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep demokrasi nasional

## 5. Uraian Materi Konsep Konsep Demokrasi

### a. Konsep- Konsep Demokrasi

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, Demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani demos berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa). Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri- cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu:

1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*).

Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

2) Sistem Konstitusional.

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)

Berdasarkan dua istilah *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

### b. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang- wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Jadi, *constitutional*

*government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*.

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut: “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*).

c. Demokrasi Rakyat

Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar (*a special form of democracy fulfilling the functions of proletarian dictatorship*). Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. Menurut Georgi Dimitrov, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai perdana menteri Bulgaria, demokrasi rakyat merupakan: “Arah dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin peran negara ke arah sosialisme (*a state in the transitional destined to development on the path to socialism*).”

Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua: a) Suatu wadah front persatuan (*united front*) yang merupakan landasan kerja sama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam penguasa; b) Penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di negara yang lama. Di China gagasan demokrasi rakyat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mao Zedong yang melancarkan gagasan mengenai Demokrasi Baru (*New Democracy*). Front persatuan juga diakuinya sebagai wadah kerja sama Partai Komunis China yang dominan dengan beberapa partai kecil lainnya.

d. Demokrasi Nasional (National Democratic State)

Perubahan sikap ini berdasarkan konsep bahwa kemenangan komunis dapat dicapai melalui “transisi damai” (*peaceful transition*), yaitu melalui saluran-saluran yang sah dan atas dasar kerja sama dengan kekuatan borjuasi yang ada. Konsep ini untuk pertama kali dicetuskan oleh Khrushchev dalam kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-20 tahun 195 dan diterima dalam suatu konferensi 4 partai komunis pada

1957. Keputusan ditandatangani oleh semua partai komunis yang hadir, termasuk wakil-wakil China, sekalipun wakil-wakil China mengedarkan suatu memorandum bahwa taktik "transisi damai" diterima dengan pengertian sebagai taktik sementara. Dalam perhitungan jangka panjang wakil-wakil China tetap menghendaki penghancuran bangunan negara.

Pada tahun 190, dalam pertemuan ke-81 partai komunis di Moskow gagasan Khrushchev dirumuskan secara lebih terperinci dan dicetuskan suatu pola baru, yaitu negara Demokrasi Nasional (*national democratic state*). Demokrasi Nasional dianggap suatu tahapan dalam perkembangan negara demokrasi borjuis (*national bourgeois state*) menjadi demokrasi rakyat sebagai suatu bentuk diktator proletariat.

## 6. Latihan

- a. Tunjukkan fakta kalau unsur-unsur demokrasi telah ditemui pada masa awal kemerdekaan Indonesia
- b. Kapankah Indonesia mempraktikkan demokrasi terpimpin?
- c. Semenjak kapan sistem demokrasi dilaksanakan di Indonesia?
- d. Identifikasi beberapa ketentuan suatu negara dikatakan mempraktikkan demokrasi!
- e. Kemukakan 10 pilar demokrasi yang diterapkan di Indonesia?

## 7. Referensi

Abu Bakar Ebyhara. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. AR- Ruzz Media. Yogyakarta.

Afan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.

Yogyakarta Ahmad Suhelmi, 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Asep Saeful Muhtadi, 2008. *Komunikasi Politik indonesia*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung

Miriam Budiardjo.. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Muhtar Habooddin & Muh Arjul. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. UB Press. Malang

Sahlan dan Marwan, 2012. *Pendidikan Partai Politik Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia.

Jakarta

8. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampuan	Tanda tangan pengampu
1				
2				
3				
4				
5				

Nilai Akhir: \_\_\_\_\_

Pengampu,



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



## MODUL 9

# Demokrasi dan HAM

Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan



Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pengantar : Pendidikan kewarganegaraan  
Demokrasi dan HAM  
Kode mata kuliah : RMIK101  
Tanggal mulai : 23 Januari 2022

**HANYAUNTUK  
PENGUNAANINTERNAL**

## **Demokrasi dan HAM**

### Modul 9



Niko Tesni Saputro  
Alfian Eka Pradana

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,  
Yogyakarta, Indonesia

## **Kata Pengantar**

Pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia saling berkaitan dengan wawasan nusantara. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Yogyakarta, 23 Januari 2022

Tim Penyusun

## Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran .....	3
2. Bahan Kajian .....	3
3. Tujuan Pembelajaran .....	3
4. Luaran .....	3
5. Uraian Materi.....	3
a. Pengertian HAM .....	3
b. <i>HAM di Eropa</i> .....	4
c. <i>HAM di Indonesia</i> .....	4
6. Lembar Catatan Pembelajaran.....	9

1. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Demokrasi

2. Bahan Kajian

- a. Perkembangan HAM di Eropa
- b. HAM di Indonesia

3. Tujuan Pembelajaran

a. Tujuan Instruksional Umum

Peserta didik mampu memahami konsep demokrasi dan macam- macam demokrasi

b. Tujuan Instruksional Khusus

1) Peserta didik mengerti dan memahami konsep HAM

2) Peserta didik mengerti dan memahami perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia

4. Luaran

- a. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep HAM dalam Demokrasi
- b. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia

## 5. Uraian Materi

### a. Pengertian HAM

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966), dicanangkan: "Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (*These rights derive from the inherent dignity of the human person*)." Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender. Dewasa ini, kita membedakan tiga generasi hak asasi. Generasi Pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Generasi Kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis yang dalam masa Perang Dingin (1945–awal tahun 1970-an) sering dinamakan dunia kedua. Kemudian hak ini didukung negara-negara yang baru membebaskan diri dari penjajahan kolonial, dan yang sering disebut dunia ketiga. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan (*development*), yang terutama diperjuangkan oleh negara-negara dunia ketiga.

### b. HAM di Eropa

Di Eropa Barat pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep Hukum Alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada Zaman Pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Di Prancis kita kenal Deklarasi mengenai Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, 1789), yang dirumuskan pada awal Revolusi Prancis. Pernyataan ini mencanangkan hak atas kebebasan (*liberté*), kesamaan (*égalité*), dan kesetiakawanan (*fraternité*). Kongres Amerika mengesahkan Undang-undang Hak Asasi (*Bill of Rights*, 1789) yang pada tahun 1791 dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dalam bentuk sepuluh amandemen.

### c. HAM di Indonesia

Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah dua periode represi (rezim Soekarno dan rezim Soeharto), reformasi berusaha lebih memajukan

hak asasi. Akan tetapi dalam kenyataannya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal, tetapi juga horisontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan secara memuaskan.

#### 1) Demokrasi Parlementer

Seperti juga di negara-negara berkembang lain, hak asasi menjadi topik pembicaraan di Indonesia. Diskusi dilakukan menjelang dirumuskannya Undang-undang Dasar 1945, 1949, 1950, pada sidang Konstituante (1956–1959), pada masa awal penegakan Orde Baru menjelang sidang MPRS 1968, dan pada masa Reformasi (sejak 1998). Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27–31, dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Sekalipun jumlahnya terbatas dan perumusannya pendek, kita boleh bangga bahwa di antara hak yang disebut UUD 1945 terdapat hak yang bahkan belum disebut dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) yaitu hak kolektif, seperti hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Di samping itu, antara lain juga disebut hak ekonomi seperti hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27), hak sosial/budaya seperti hak atas pendidikan (Pasal 31). Akan tetapi hak politik seperti kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28). Jadi, hak asasi itu dibatasi oleh undang-undang.

#### 2) Demokrasi Terpimpin

Dengan kembalinya Indonesia ke UUD 1945 dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Di bawah Presiden Soekarno beberapa hak asasi, seperti hak mengeluarkan pendapat, secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Beberapa surat kabar dibredel, seperti Pedoman, Indonesia Raya dan beberapa partai dibubarkan, seperti Masyumi dan PSI dan pemimpinnya, Moh. Natsir dan Syahrir, ditahan. Sementara itu, pemenuhan hak asasi ekonomi sama sekali diabaikan; tidak ada garis jelas mengenai kebijakan ekonomi. Biro Perancang Negara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956–1961 dan melaksanakannya selama satu tahun, dibubarkan. Rencana itu diganti dengan Rencana Delapan Tahun, yang tidak pernah dilaksanakan. Perekonomian

Indonesia mencapai titik terendah. Akhirnya pada tahun 1966 Demokrasi Terpimpin diganti dengan Demokrasi Pancasila atau Orde Baru.

### 3) Demokrasi Pancasila

Di Indonesia ada dua aliran pemikiran mengenai hak-hak asasi. Aliran pertama, yang lebih bersifat inward looking, berpendapat bahwa dalam membahas hak asasi kita hanyamemakai Indonesia sebagai referensi, karena kita sudah kenal hak asasi mulai dari zaman dulu kala. Lagi pula kesejahteraan rakyat sangat perlu ditangani secara serius. Pendapat ini secara implisit berarti bahwa Indonesia tidak perlu terlalu menghiraukan pendapat dari pihak luar serta naskah-naskah hak asasinya. Aliran lain adalah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang, sekalipun tidak diungkapkan secara eksplisit, cenderung mengacu pada perumusan persepsi dunia Barat dengan lebih menonjolkan hak-hak politik seperti kebebasan mengutarakan pendapat. Kelompok ini, yang dapat disebut outward looking, menerima saja apa yang telah dikonsensuskan dalam berbagai forum internasional dan memakai perumusan itu sebagai patokan untuk usaha penegakan hak asasi dalam negeri. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa beberapa nilai tradisional seperti negara integralistik memberi justifikasi untuk mempertahankan kecenderungan ke arah strong government yang dengan mudah dapat berkembang menjadi otoriterisme. Akan tetapi, sesudah diterimanya Deklarasi Wina (1993) kedua pandangan ini telah mengalami semacam konvergensi.

### 4) Reformasi

Pemerintah Habibie (Mei 1998–Oktober 1999) pada awal masa Reformasi mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 1998–2003, yang sayangnya sampai sekarang belum banyak dilaksanakan. Dalam masa Reformasi pula Indonesia meratifikasi dua Konvensi Hak Asasi Manusia yang penting yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Terutama dalam melaksanakan hak mengutarakan pendapat, Reformasi sangat berhasil. Berbagai kalangan masyarakat mengadakan seminar-seminar di mana pemerintah dengan bebas dikritik, begitu juga media massa dalam talkshownya dan berbagai LSM. Demonstrasi-demonstrasi melanda masyarakat, di antaranya ada yang berakhir dengan kekerasan. Lewat berbagai demonstrasi, baik Presiden Habibie maupun

Presiden Abdurahman Wahid terpaksa meletakkan jabatan masing-masing pada tahun 1999 dan tahun 2001.<sup>27</sup> Dan Presiden Megawati Soekarnoputri pun tidak luput dari arus demonstrasi ini.

Akan tetapi dalam masa Reformasi pemenuhan hak asasi ekonomi telah mengalami kemunduran tajam. Sekalipun banyak faktor internasional memengaruhi ekonomi Indonesia, akan tetapi tidak sedikit faktor internal yang menyebabkannya. Faktor eksternal adalah kemerosotan ekonomi di seluruh dunia, dan reaksi dunia atas peristiwa bom Bali dan gerakan antiterorisme. Faktor internal menyangkut kegagalan pemberantasan korupsi, manajemen sistem bank dan pengaturan berbagai aspek kehidupan ekonomi lainnya. Ditambah dengan akibat dari berbagai konflik sosial di sejumlah daerah yang mengakibatkan bangkainya jumlah pengungsi, terlantarnya pendidikan, dan kerugian kolateral yang perlu dibangun kembali. Beberapa kemajuan yang telah dicapai di bidang pertumbuhan ekonomi, pemberantasan pengangguran, dan pendapatan perkapita mengalami kemunduran.

## 6. Latihan

- a. Berikan Contoh beberapa penyebab terjadinya pelanggaran HAM
- b. Mengapa pelanggaran HAM tidak hanya menjadi tugas pemerintah? Berikan Alasannya!
- c. Berikan contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda!
- d. Berikan opini Anda akibat yang terjadi jika pelanggaran HAM tidak segera di tangani!
- e. Berikan pemahaman Anda mengenai tugas Komnas HAM dalam pemantauan!

## 7. Referensi

- Abu Bakar Ebyhara. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. AR- Ruzz Media. Yogyakarta.
- Afan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Ahmad Suhelmi, 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Asep Saeful Muhtadi, 2008. *Komunikasi Politik indonesia*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Miriam Budiardjo.. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Muhtar Habooddin & Muh Arjul. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. UB Press. Malang
- Sahlan dan Marwan, 2012. *Pendidikan Partai Politik Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

8. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampuan	Tanda tangan pengampu
1				
2				
3				
4				
5				

Nilai Akhir: \_\_\_\_\_

Pengampu,



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# MODUL 10

## Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan



Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pengantar : Pendidikan kewarganegaraan  
Demokrasi dan Pendidikan  
Demokrasi  
Kode mate kuliah : RMIK101  
Tanggal mulai : 23 Januari 2022

## **Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi**

### Modul 10



Niko Tesni Saputro

Alfian Eka Pradana

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,  
Yogyakarta, Indonesia

## **Kata Pengantar**

Pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia saling berkaitan dengan wawasan nusantara. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Yogyakarta, 23 Januari 2022

Tim Penyusun

## Daftar Isi

1. Capaian .....	4
2. Bahan Kajian .....	4
3. Tujuan Pembelajaran.....	4
4. Luaran .....	5
5. Uraian Materi .....	4
a. Latar Belakang Demokrasi.....	6
b. Pengertian dan Makna Demokrasi .....	7
c. Prinsip dan Nilai Demokrasi .....	10
d. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.....	11
e. Pendidikan Demokrasi .....	12
f. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional.....	12
g. PKN sebagai Pendidikan Demokrasi .....	12
6. Tugas Mahasiswa .....	14
7. Referensi .....	15
8. Lembar Catatan Pembelajaran .....	16

1. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat mengetahui, mengerti, memahami arti demokrasi dan pendidikan demokrasi dan mampu menerapkannya secara nyata.

2. Bahan Kajian

- a. Latar Belakang Demokrasi
- b. Pengertian dan makna demokrasi
- c. Prinsip dan nilai demokrasi
- d. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
- e. Pendidikan demokrasi
- f. Fungsi dan tujuan Pendidikan demokrasi
- g. PKN sebagai Pendidikan Demokrasi

3. Tujuan Pembelajaran

a. Tujuan Instruksional Umum

Peserta didik mampu memahami arti demokrasi dan Pendidikan demokrasi dan menerapkannya secara nyata

b. Tujuan Instruksional Khusus

- 1) Mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mengerti arti dan makna demokrasi, berdemokrasi dan pendidikan demokrasi
- 2) Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan kehidupan yang demokratis secara nyata
- 3) Mahasiswa dapat menganalisis dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis

4. Luaran

- a. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep demokrasi
- b. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia
- c. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam penerapan dan menjalankan fungsi pendidikan demokrasi

## 5. Uraian Materi

### a. Latar Belakang Demokrasi

Istilah demokrasi dikenal secara luas dan populer terutama di abad 19. Namun demikian secara umum Demokrasi dalam pengertian nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan sebenarnya sudah jauh seiring dan sejalan dengan peradaban manusia. Hal itu karena, demokrasi sebagai nilai, berkaitan dengan hasil pergulatan pemikiran umat manusia berabad-abad sehingga nilai-nilai demokrasi telah berkembang sejak lama. Dengan demikian dapat dikatakan, perkembangan konsep demokrasi seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri.

Kehidupan manusia mengalami perubahan dan dengan perubahan tersebut manusia berkembang kearah yang semakin baik. Hal itu bisa dilihat dari jaman primitive(tradisional), totaliter, fasis, monarkhi (kerajaan), dan feudal serta akhirnya demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan rangkaian dari masa-masa sebelumnya dan dapat dikatakan sebagai reaksi kearah yang lebih baik dari jaman sebelumnya. Konsep Demokrasi merupakan perbaikan dari masa sebelumnya. Perubahan demi perubahan konsep kehidupan bersama yang semakin lama mengarah semakin baik kemudian melahirkan konsep negara demokrasi. Demokrasi lahir dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Demokrasi dapat dikatakan sebagai reaksi atau penyempurnaan terhadap sistem-sistem pemerintahan negara terdahulu. Walaupun dapat dikatakan demokrasi sebagai penyempurnaan sistem pengelolaan pemerintahan negara yang lebih dahulu namun bukan berarti demokrasi tidak ada celanya dan serba sempurna. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara pasti terdapat kelemahan-kelemahan. Dan tidak semua system pemerintahan terdahulu semisal feudal, kerajaan (monarkhi), autokrasi, dikatator dan lain sebagainya adalah jelek. Yang lebih pas adalah system itu memang tepat untuk jamannya demikian pula dengan demokrasi yang merupakan system pemerintahan negara yang dianggap tepat untuk abad 19 ini. Dengan kata lain konsep kenegaraan masih sangat terbukademi perbaikan itu sendiri terutama dimasa-masa yang akan datang. Dan sebagai sistem demokrasi disamping terdapat keunggulan(kebaikan) pasti juga terdapat kelemahan-kelemahannya.

Istilah demokrasi dikenal luas di hampir semua negara dewasa ini

termasuk di Indonesia. Hampir semua Negara menyatakan sebagai Negara ‘yang paling’ demokrasi walaupun dengan konsep yang belum tentu sama dengan pemahaman demokrasi pada umumnya. Sebagai contoh Amerika Serikat menganggap sebagai kampiunnya demokrasi (terutama demokrasi barat), negara komunis Cina juga menyatakan sebagai Negara yang menggunakan demokrasi (demokrasi rakyat). Demikian pula di hampir semua Negara di abad ini menyatakan sebagai Negara demokrasi. Penerapan demokrasi sendiri di tiap Negara tidaklah sama hal itu disebabkan karena budaya masing-masing Negara yang berbeda. Budaya merupakan nilai-nilai yang melingkupi suatu masyarakat yang mendiami Negara. Keberadaannya menjadi unsur pembeda dalam penerapan demokrasi. Praktek demokrasi di tiap-tiap Negara berbeda-beda.

Demokrasi di Indonesia sejak tahun 1998 ditandai dengan kebebasan politik berlebihan menghasilkan *euphoria* yang pada akhirnya menjadikan Negara tidak stabil dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Kebanyakan orang lupa bahwa untuk mencapai keharmonisan dan kestabilan politik (negara) disamping kebebasan politik (demokrasi) adalah hukum (penegakan hukum), anehnya ada sebagian orang yang melupakan hal itu. Sebagian orang lupa dan menginginkan ‘kebebasan tanpa batas’ yang akhirnya Negara diujung kekacauan dan ketidakharmonisan disegala bidang dan melupakan dan bahkan ‘menghilangkan’ penegakan hukumnya.

Kondisi Indonesia sejak tahun 1998 yang dilanda krisis menandakan *euphoria* yang berlebihan. Penerapan demokrasi dengan menafsirkan bebas sebeb-bebasnya telah menjadikan banyak keributan dan kekacauan apalagi kebebasan tersebut tidak disertai dengan pertanggungjawaban pada masyarakat dan Tuhan, Konflik dan kerusuhan sering terjadi dengan mengatamakan dan menyalgunakan demokrasi sehingga demokrasi menjadi kehilangan makna yang sesungguhnya. Demokrasi yang tidak disertai dengan nilai-nilai yang memadai akan mengakibatkan pelanggaran terhadap makna demokrasi itu sendiri dan mencederai sisi-sisi kemanusiaan serta menghambat pembangunan ekonomi. Hal seperti itu pernah terjadi di India dimana rakyat ‘sangat’ demokratis tetapi justru yang terjadi adalah sering terjadi konflik, pertikaian dan konflik (termasuk kerusuhan) yang tidak berkesudahan.

Demokrasi perlu dilaksanakan secara baik dengan mengindahkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi bukan berarti bebas sebeb-bebasnya tanpa batas.

Demokrasi perludisertai dengan etika/moral yang luhur. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia perlu dilandasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu: ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kedaulatan rakyat serta keadilan sosial. Nilai-nilai pancasila tersebut perlu menjadi dasar yang utama bagi tetap tegainya demokrasi di Indonesia dan tentunya juga tidak menutup pengaruh asing dengan catatan harus disaring disesuaikan dengan situasi dankondisi bangsa Indonesia sendiri. Pengaruh asing tidak selamanya baik oleh karena itu masyarakat Indonesia harus bias memilah-milah dan membedakan mana yang sesuai dengan masyarakat Indonesia .

b. Pengertian dan Makna Demokrasi

Menurut Kranenburg demokrasi terbentuk dari dua suku kata Yunani, yaitu: *demos* dan *kratos* (*cratein*). *Demos* berarti rakyat dan *kratos*(*kratein*) yang berarti pemerintahan (orang yang memerintah / berkaitan dengan kekuasaan). Dari kata itu berarti demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan rakyat sangat menentukan. Rakyatlah yang punya kekuasaan yang sesungguhnya. Kekuasaan rakyat itu dipercayakan pada segelintir orang yang lebih sedikit yaitu penguasa untuk menjalankan apa-apa yang dikehendaki rakyat dan nantinya tentunya bertanggungjawab pada rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Penguasa mendapat kekuasaan dari rakyat dan menjalankan kekuasaan atas mandate (pemberian kewenangan dari rakyat) tanpa ada mandat dari rakyat maka kekuasaan tidakmemiliki legitimasi (tidak sah). Dalam Negara demokrasi pemegang kekuasaan utama sebenarnya adalah rakyat dan kemudian rakyat menyerahkan kekuasaan itu kepada penguasa melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Penguasa menjalankan kekuasaannya atas kehendak rakyat sebagai hal utama dari demokrasi.

Menurut Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah *the government for, by, and from the people* (demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat). Dari pernyataan itu maka demokrasi adalah pemerintahan dengan rakyat yang menentukan. Demokrasi juga bias dikatakan sebagai pemerintahan rakyat. Dari situlah lahir konsep kekuasaan rakyat, dan kekuasaan rakyat yang tertinggi itulah yang disebut kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak bisa dilepaskan dengan konsep kedaulatan rakyat. Makna Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi berarti rakyat sangat menentukan, hanya saja dalam Negara modern rakyat tidak mungkin mengatur

semua urusan negara, oleh karena itu diperlukan mekanisme dan prosedur demokrasi yang perlu dilaksanakan. Demokrasi menghendaki mekanisme dan prosedur. Mekanisme dan prosedur demokrasi itu melahirkan konsep demokrasi baik langsung, konstitusional maupun perwakilan. Dalam abad ini demokrasi yang banyak diterapkan adalah demokrasi perwakilan yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan rakyat dan wakil-wakil tersebut bertanggungjawab pada rakyat yang memilihnya. Prosedur memilih wakil-wakil rakyat tersebut dilakukan dengan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

c. Prinsip dan Nilai Demokrasi

Suatu hal yang prinsip dan dikenal umum bahwa dalam Negara yang menganut demokrasi adalah adanya kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menghormati minoritas, dan hidup layak Prinsip-prinsip itu merupakan hak kodrati manusia sebagai manusia (manusia yang beradab). Keberadaan prinsip-prinsip demokrasi berkaitan dengan keberadaan manusia yang paling hakiki. Demokrasi melindungi, menuntut dan mendorong terpenuhi hak-hak dasar tersebut terpenuhi tanpa pandang bulu dan membedakan. Dalam Negara demokrasi semua orang harus diberi hak dan kesempatan yang sama. Sesama warganegara tidak boleh dibedakan dengan alasan apapun, demokrasi menghendaki terjadi hubungan yang sama dan setara (*egaliter*). Dengan demikian kesetaraan warga Negara menjadi hal utama. Tidak boleh ada pembedaan warganegaraan dengan alasan apapun baik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) serta keturunan ataupun alasan lain.

Dalam Negara Demokrasi menghendaki juga terpenuhi kebutuhan umum, artinya kebutuhan yang berkaitan dengan rakyat menjadi focus perhatian. Kebutuhan umum menyangkut kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta kebaikan bersama. Kesejahteraan dan kemakmuran bersama menjadi dasar dalam mencapai kebahagiaan. Atas dasar itulah kebutuhan yang merupakan kebutuhan menyangkut masyarakat umum perlu dikedepankan terutama bila dibandingkan dengan kebutuhan pribadi dan golongan. Demokrasi menghendaki penghormatan terhadap perbedaan (*pluralisme*). Perbedaan dalam masyarakat yang plural adalah sebagai sesuatu yang wajar dan bukan pemicu konflik dan peretentangan tetapi justru sebagai kekayaan. Perbedaan adalah hal yang wajar dan tidak boleh ada pemaksaan, penekanan serta merupakan kewajaran. Perbedaan dalam kehidupan perlu

dipahami sebagai unsur pemersatu bangsa dan dengan dilandasi sikap saling pengertian dan pemahaman yang sehat yaitu dengan akal sehat dan hatinurani. Oleh karena itu dalam demokrasi perlu ada sikap saling memahami dan pengertian, perlu kompromi, keterbukaan dan kearifan. Sikap mau mengakui kelebihan dan kekurangan menjadi sikap dasar dan tidak ada manusia yang sempurna. Kompromi disini akan terjadi kalau pemikiran akan perbedaan dilandasi saling memahami dan mau mengerti serta saling menghormati dan tidak memaksakan pendapat.

Demokrasi menghendaki adanya jaminan hak-hak dasar. Hak-hak dasar manusia dijunjung tinggi karena itu berkaitan dengan martabat dan kodrat manusia sebagaimana manusia. Manusia hidup didunia ini adalah disertai hak-hak dasar yang tidak bias diganggu oleh siapapun selama pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hak dasar orang lain. Hak dasar itu seperti hak untuk hidup, memperoleh penghidupan yang layak, bebas berekspresi, berpendapat dan berserikat ternasuk terhindar dari rasa ketakutan. Dalam demokrasi juga diperlukan adanya perubahan sosial yang damai. Perubahan sosial secara demokratis memungkinkan terjadinya perubahan kehidupan sistem pemerintahan Negara secara damai dan melembaga. Perubahan sosial yang terjadi dengan bersamaan dengan demokrasi adalah perubahan sosial yang beradab dan sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang dilandasi dengan nilai dan kodrat sebagai manusia yang beradab. Perubahan kehidupan kenegaraan akan berjalan sesuai dengan harapan rakyat bila rakyat memahami demokrasi secara benar.

Menurut Henry B Mayo demokrasi didasari oleh menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Penyelesaian perselisihan secara damai sangat penting. Dikatakan demokrasi bila cara-cara damai dikedepankan. Fungsi lembaga-lembaga politik termasuk parlemen salah satunya adalah bagaimana membawa perselisihan dan pertikaian dimasyarakat dibawa kegedung parlemen kemudian dicarikan solusi secara damai. Bila ini tercapai maka demokrasi berarti berjalan dengan baik. Demokrasi juga merupakan jaminan agar terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. Kehidupan masyarakat adalah selalu berubah. Dalam perubahan tersebut menghasilkan kelompok yang mapan (*status quo*), pro keamanan (*pro status quo*) dan yang anti keamanan (*anti status quo*). Perubahan demi perubahan akan rawan konflik, perikaian dan permusuhan. Disinilah peran demokrasi akan menemukan tempat yang tepat untuk membawa setiap perubahan dalam masyarakat berlangsung secara damai. Lebih lanjut Henry B Mayo

menekankan perlunya menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, dan mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman (keberagaman) serta menjamin tegaknya keadilan

d. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1) Demokrasi Parlemitter (1945 – 1959)

Kehidupan politik di Indonesia masa Demokrasi Parlemitter ditandai dengan kekuasaan yang berat di parlemen (*legislative heavy*) sehingga mengakibatkan pemerintah tidak stabil. Akibat berikutnya program pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan karena sering bergantinya yang bertugas melaksanakan pemerintahan. Pada masa Demokrasi Parlemitter kedudukan pemerintahan dan keberadaannya sangat bergantung pada dukungan DPR. Dengan kata lain DPR sangat kuat. Padahal perbedaan pendapat diantara anggota DPR yang notabennya berasal dari berbagai partai politik berlangsung sangat mendasar dan hal tersebut mempengaruhi jalannya pemerintahan.

2) Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Demokrasi terpimpin lahir sebagai reaksi dari keburukan praktek Demokrasi Parlemitter. Keburukan praktek Demokrasi Parlemitter memberikan keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan yang kemudian mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin. Secara konsepsional demokrasi terpimpin berupaya mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Demokrasi terpimpin dalam praktek sebenarnya yang terjadi adalah demokrasi yang dipimpin oleh Pemimpin Besar Revolusioner, yaitu Ir. Soekarno (sebagai Presiden).

Pokok-pokok demokrasi terpimpin menurut Bung Karno tertanggal 22 April 1959 adalah sebagai berikut :

- a. Demokrasi terpimpin bukan diktator
- b. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia
- c. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial
- d. Inti dari pada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

- e. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin

### 3) Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966 – 1998)

- a. Demokrasi Pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial
- b. Demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip Demokrasi Konstitusional
- c. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong-royong
- d. Penyimpangan yang dilakukan ORDE BARU khususnya yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila, yaitu:
  - a) penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
  - b) pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS
  - c) masih adanya intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan
  - d) kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
  - e) sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah
  - f) maraknya praktek KKN
  - g) menteri-menteri dan gubernur-gubernur diangkat menjadi anggota MPR

### 4) Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi (1998 – saat ini)

- a) Perbedaan terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan negara
- b) Perubahan pelaksanaan demokrasi pada era reformasi nampak dalam hal:
  - 1) pemilihan umum lebih demokratis
  - 2) partai politik lebih mandiri
  - 3) pengaturan hak azasi manusia
  - 4) lembaga demokrasi lebih berfungsi
- c) Demokrasi akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai

budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya

- d) Pelaksanaan demokrasi harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa

e. Pendidikan Demokrasi

Demokrasi dewasa ini ternyata memerlukan syarat hidup yaitu warga Negara yang memiliki dan menegakan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya demokrasi ini membutuhkan waktu yang lama, berat dan sulit. Oleh karena itu, secara substantif berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokratis mutlak diperlukan. Karena pada hakikatnya pendidikan demokrasi adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh oleh warga Negara.

Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi.

f. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

g. PKN sebagai Pendidikan Demokrasi

Sekarang ini banyak kalangan menghendaki Pendidikan Kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi mengembanmisi sebagai pendidikan nasional.

Tuntutan demikian tidak salah oleh karena secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri dari pemerintah yang demokratis. *International Commission of Jurist* sebagai organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok 1965 mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan konstitusionil, dalam arti konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals)
- 3) Pemilihan umum yang bebas
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasidan beroposisi
- 6) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*)

## 6. Tugas Mahasiswa

Mahasiswa diminta untuk membuat makalah / tulisan secara berkelompok yang berkaitan dengan berbagai konflik, pertikaian, permusuhan dan termasuk pemberontakan yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Apa sudah dilaksanakan? Kalau belum bagaimana solusi yang harus diambil? Kemudian mendiskusikannya!

## 7. Referensi

Martini, dkk (tim Dosen Mku UNJ). Polok-Pokok Materi Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: MKU FIS UNJ, 2009

Srijanti, dkk, Etik Kewarganegaraan, Jakarta: MKCU UMB, 2007

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000

Ian Adams, Ideologi Politik Mukhtakhir, Yoyakarta: CV. Qalam, 2004

William Ebenstein dkk(alih bahasa Alex Jemadu), Isme-Isme dewasa ini, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987

8. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampuan	Tanda tangan pengampu

Nilai Akhir: \_\_\_\_\_

Pengampu,



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



## MODUL 11

# Sikap dan Perilaku Sesuai Standar Nilai Moral yang Luhur

Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan



Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pengantar : Pendidikan kewarganegaraan  
Sikap dan Perilaku Sesuai Standar  
Nilai Moral yang Luhur  
Kode mate kuliah : RMIK101  
Tanggal mulai : 23 Januari 2022

## **Sikap dan Perilaku Sesuai Standar Nilai Moral yang Luhur**

### Modul 11



Niko Tesni Saputro  
Alfian Eka Pradana

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,  
Yogyakarta, Indonesia

## **Kata Pengantar**

Pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia saling berkaitan dengan wawasan nusantara. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicituskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Yogyakarta, 23 Januari 2022

Tim Penyusun

## Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran.....	4
2. Bahan Kajian.....	4
3. Tujuan Pembelajaran.....	4
4. Luaran .....	4
5. Uraian Materi .....	5
a. Makna Bertutur Kata Sesuai dengan Nilai Pancasila.....	5
b. Hakikat Bertutur Kata, Bersikap, dan Berperilaku Sesuai dengan Nilai Nilai Pancasila.....	6
c. Bertutur Kata Sesuai dengan Nilai Nilai Pancasila.....	7
d. Bersikap Sesuai Nilai Nilai Pancasila .....	8
6. Latihan .....	9
7. Referensi .....	10
8. Lembar Catatan Pembelajaran .....	11

1. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat mengetahui, mengerti, memahami arti demokrasi dan mampu menerapkannya secara nyata.

2. Bahan Kajian

- a. Makna bertutur kata sesuai dengan pancasila
- b. Hakikat Bertutur Kata, Bersikap, Dan Berperilaku Sesuai Dengan Nilai Nilai Pancasila
- c. Bertutur Kata Sesuai Dengan Nilai Nilai Pancasila
- d. Bersikap Sesuai Nilai Nilai Pancasila

3. Tujuan Pembelajaran

a. Tujuan Instruksional Umum

Peserta didik mampu memahami arti demokrasi dan menerapkannya secara nyata

b. Tujuan Instruksional Khusus

- 1) Mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mengerti arti dan makna demokrasi, berdemokrasi dan pendidikan demokrasi
- 2) Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan kehidupan yang demokratis secara nyata
- 3) Mahasiswa dapat menganalisis dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis

4. Luaran

- a. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep HAM dalam Demokrasi
- b. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia

## 5. Uraian Materi

### a. Makna Bertutur Kata Sesuai dengan Nilai Pancasila

Manusia adalah makhluk sosial yang perlu berkomunikasi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan. Manusia memiliki perasaan yang dapat merasakan senang, sedih, kecewa, dan lain lain. Untuk itu dalam berkomunikasi diperlukan Bahasa yang sopan dan satu sama lain dan lancer dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Manusia tidak ingin diperlakukan kasar, tidak patut, dan ingin dihargai dan dihormati dan diperlakukan baik secara manusiawi, untuk itu manusia perlu bertutur kata yang baik.

No	Sila	Sikap yang sesuai
1	Ketuhanan yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Percaya dan taqwa kepada tuhan yang maha esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab</li><li>b. Hormat dan menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut penganut kepercayaan yang berbeda beda, sehingga terbina kerukunan hidup</li><li>c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.</li><li>d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain</li></ul>

2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.</li> <li>b. Saling mencintai sesama manusia</li> <li>c. Mengembangkan sikap tegang rasa</li> <li>d. Tidak semena mena terhadap orang lain</li> <li>e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan</li> <li>f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan</li> <li>g. Berani membela kebenaran dan keadilan</li> <li>h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain</li> </ul>
3	Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan</li> <li>b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara</li> <li>c. Cinta tanah air dan bangsa</li> <li>d. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia</li> <li>e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika</li> </ul>

4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat</li> <li>b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain</li> <li>c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama</li> <li>d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan</li> <li>e. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah serta mempertanggung jawabkan secara moral kepada tuhan yang maha esa</li> </ul>
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan</li> <li>b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban</li> <li>d. Menghormati hak orang lain</li> <li>e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri</li> <li>f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.</li> </ul>
--	--	--

b. Hakikat Bertutur Kata, Bersikap, dan Berperilaku Sesuai dengan Nilai Nilai Pancasila

Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila dijadikan sebagai landasan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dalam segala hal, termasuk dalam bertutur kata, bersikap dan berperilaku. Tutur kata, sikap, dan perilaku merupakan salah satu wujud dari budi pekerti manusia. Tutur kata, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila merupakan wujud budi pekerti luhur manusia Indonesia. Apabila kita bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai Pancasila menunjukkan keluhuran harkat, derajat dan martabat manusia Indonesia.

c. Bertutur Kata Sesuai dengan Nilai Nilai Pancasila

Bertutur kata yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila adalah bertutur kata baik yang diwujudkan dengan berkata kata atau berbincang bincang tidak kasar atau tidak kotor. Dengan berkata yang baik maka orang lain: tidak akan tersinggung, tidak kecewa, tidak marah, tidak sakit hati. Tutur kata yang baik merupakan sikap atay adab dalam berbicara yang penuh kesopandan mampu menempatkan Bahasa yang pantas sesuai dengan situasi dan kondisi maupun siapa yang kita ajak bicara. Bertutur kata yang buruk, bukan merupakan kepribadian bangsa Indonesia, karta hal tersebut bertentangan dengan nilai nilai Pancasila dan dapat menyebabkan rendahnya penilaian orang lain terhadap kita.

Hal yang diperhatikan agar terhindar dari tutur kata yang buruk

- 1) Berpikir sebelum berkata kata atau menyampaikan sesuai kepada orang lain
- 2) Pikiikan akibat dari kata kata yang akan di ucapkan
- 3) Berbicara seperlunya stanpa harus memperbanyak pembicaraan yang tidak bermanfaat

- 4) Sampaikan maksud dengan bahasa yang halus dan tidak berbelit belit
- 5) Tidak meninggikan atau mengeraskan suara Ketika berbicara
- 6) Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada lawan bicara
- 7) Berusaha membalas perkataan buruk dengan perkataan baik dan sopan

d. Bersikap Sesuai Nilai Nilai Pancasila

Bersikap sesuai dengan nilai nilai Pancasila sama dengan bersikap positif terhadap Pancasila. Sikap tersebut harus ditampilkan dalam kehidupan sehari hari di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh komponen bangsa, baik rakyat maupun aparat pemerintah mengamalkan nilai nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sikap positif itu terutama adalah kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan pemahaman mengenai Pancasila semakin tampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sikap yang baik dan mendukung terhadap nilai nilai Pancasila serta berupaya melestarikan dan mempertahankannya. Nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari hari dengan berperan serta mengamalkan nilai nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Secara umum perilaku manusia dibagi menjadi

- 1) Perilaku yang baik: perilaku yang mulia, yaitu yang mengindahkan berbagai aturan yang berlaku atau sesuai dengan norma norma yang berlaku
- 2) Perilaku yang buruk: perilaku yang tidak sesuai dengan norma norma yang berlaku, perilaku ini merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan dapat mengakibatkan hal hal yang tidak baik.

Warga negara yang baik, harus berperilaku yang baik sesuai dengan nilai nilai Pancasila. Hal ini berarti nilai nilai Pancasila yang telah diyakini kebenarannya, hal ini berarti nilai nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya harus diamalkan, diwujudkan dalam kehidupan sehari hari

## 6. Latihan

- a. Bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
- b. Tuliskan Contoh menghayati nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari!
- c. Jelaskan 4 (empat) perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan masyarakat!
- d. Sila Pancasila yang mana yang menjadi sumber nilai kehidupan bagi bangsa Indonesia?

## 7. Referensi

- Azra, Azyumardi. 2002. "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia." Makalah dalam Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei
- Darmodihardjo, Dardji. 1996. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali
- Hakim, Suparlan, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Malang: Universitas Negeri Malang
- Kaelan. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2003. Pendidikan Pancasila. Yagjakarta: Paradigma
- Margono, dkk. 2002. Pendidikan Pancasila (Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sumantri, Muhammad Numan. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Sumarsono, dkk. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ubaidillah, A., dkk. 2006. Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE, UIN Syarif Hidayatullah.
- Winataputra, Udin. 2001. "Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan." Makalah dalam Lokakarya Civic Education Dosen IAIN/STAIN Se-Indonesia, Sawangan-Depok
- Yusra, Dhoni. 2006. Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Graha Ilmu.
- Zamroni. 2001. Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society. Yogyakarta : BIGRAF Publishing

8. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampuan	Tanda tangan pengampu
1				
2				
3				
4				
5				

Nilai Akhir: \_\_\_\_\_

Pengampu,



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



## MODUL 12

# Sikap dan Perilaku Sesuai Standar Nilai Moral yang Luhur

Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan



Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pengantar : Pendidikan kewarganegaraan  
Sikap dan Perilaku Sesuai Standar  
Nilai Moral yang Luhur  
Kode mate kuliah : RMIK101  
Tanggal mulai : 23 Januari 2022

## **Sikap dan Perilaku Sesuai Standar Nilai Moral yang Luhur**

### Modul 12



Niko Tesni Saputro  
Alfian Eka Pradana

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,  
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,  
Yogyakarta, Indonesia

## **Kata Pengantar**

Pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia saling berkaitan dengan wawasan nusantara. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Yogyakarta, 23 Januari 2022

Tim Penyusun

## Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran .....	4
2. Bahan Kajian .....	4
3. Tujuan Pembelajaran .....	4
4. Luaran .....	4
5. Uraian Materi.....	5
a. Makna Nilai .....	6
b. Makna Norma.....	7
c. Makna Moral .....	8
d. Hubungan Nilai, Norma, dan Moral.....	9
6. Latihan .....	12
7. Referensi .....	13
8. Lembar Catatan Pembelajaran.....	14

1. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat mengetahui, mengerti, memahami arti nilai, norma, dan moral dan mampu menerapkannya secara nyata.

2. Bahan Kajian

- a. Makna Nilai
- b. Makna Norma
- c. Makna Moral
- d. Hubungan Nilai, Norma, dan Moral

3. Tujuan Pembelajaran

a. Tujuan Instruksional Umum

Peserta didik mampu memahami arti nilai, norma serta moral dan menerapkannya secara nyata

b. Tujuan Instruksional Khusus

- 1) Mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mengerti arti dan makna nilai, norma, dan moral.
- 2) Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan kehidupan yang sesuai dengan nilai, norma dan moral sebagai warga negara

4. Luaran

- a. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep pengertian nilai, norma dan moral
- b. Mahasiswa dapat mengimplementasikan nilai, norma, moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

## 5. Uraian Materi

### a. Makna Nilai

Pengertian nilai yang dalam bahasa Inggris disebut “*value*”, menurut Djahiri (1999), dapat diartikan sebagai harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut Dictionary dalam Winataputra (1989), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Kajian tentang nilai dalam bidang filsafat dibahas dan dipelajari secara khusus pada salah satu cabang filsafat yang disebut Filsafat Nilai atau yang terkenal dengan istilah *Axiology, The Theori of Value*. Cabang filsafat ini sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.

Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* ditemukan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok (*The beleived Capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu, misalnya bunga itu indah, perbuatan itu susila. Indah, susila adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian, maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang “tersembunyi” di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada nilai itu, karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai yang disebut wartrager (Kaelan, 2003: 87).

Menilai berarti, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa

(kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya.

Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaandambaan dan keharusan. Oleh karena itu, apabila kita berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang das solen bukan das sein. Kita masuk ke rohanian bidang makna normatif, bukan kognitif, kita masuk dunia ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, di antara keduanya, antara das solen dan das sein, antara yang makna normatif dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berkait secara erat. Artinya bahwa das solen itu harus menjelma menjadi das sein, yang ideal menjadi real, yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta.

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, berusaha mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan nilai-nilai fi Isafat bangsa yaitu Pancasila. Pelaksanaannya selain melalui taksonomi yang dikembangkan oleh Bloom, juga bisa menggunakan jenjang afektif yaitu menerima nilai (*receiving*), menanggapi nilai/penanggapan nilai (*responding*), penghargaan nilai (*valuing*), pengorganisasian nilai (*organization*), karakterisasi nilai (*characterization*). Nilai Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan pandangan hidup/panutan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, ditingkatkan kembali menjadi Dasar Negara yang secara yuridis formal ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia merdeka. Secara spesifik, nilai Pancasila telah tercermin dalam norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, serta norma hukum.

Dengan demikian, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan dalam cara bertindak. Misalnya, nilai contoh gotong-royong. Jika perbuatan gotong-royong dimaknai sebagai nilai, maka akan lebih bermakna jika nilai gotong-royong tersebut telah menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seseorang secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, nilai gotong-royong seperti yang dicontohkan tadi adalah perilaku yang menunjukkan adanya rasa saling

membantu sesama dalam melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan secara bersama-sama sebagai perwujudan dari rasa solidaritas yang memiliki makna kebersamaan dalam kegiatan bergotong-royong

b. Makna Norma

Norma adalah tolok ukur/alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah (Margono, 2001:67). Dalam bahasa Inggris, norma diartikan sebagai standar. Di samping itu, norma juga bisa diartikan kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Jika norma dipahami sebagai standar (ukuran) perilaku manusia, yang dapat dijadikan “alat” untuk menghakimi (justifikasi) suatu perilaku manusia (benar atau salah), maka dalam realitas kehidupan sehari-hari terdapat paling tidak 5 norma, yaitu (1) norma agama, (2) norma hukum, (3) norma moral atau susila, (4) norma kebiasaan, dan (5) norma kesopanan.

Norma agama adalah tolok ukur benar salah yang mendasarkan diri pada ajaran-ajaran agama. Dalam agama-agama selalu ada perintah dan larangan. Ada halal haram lengkap dengan sanksi- sanksi bagi pelanggar ajaranajaran agama. Norma agama itu tentunya berlaku bagi pemeluknya karena beragama itu dasarnya adalah keyakinan. Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat dan dianggap perlu demi kemaslahatan dan kesejahteraan umum (norma hukum tidak dibiarkan untuk dilanggar dan tidak sama dengan norma moral). Bisa saja terjadi, demi tuntutan suara hati sebagai manusia dan demi kesadaran moral, seseorang harus melanggar hukum. Meskipun pada akhirnya, pelanggar hukum itu dipenjara namun orang yang dihukum itu belum tentu sebagai orang yang buruk/jahat. Para tahanan politik misalnya, banyak di antara mereka yang berjuang melawan penguasa demi kepentingan rakyat.

Bisa saja mereka dijerat dengan hukum, dan dia dipenjarakan dan dinyatakan bersalah secara hukum, namun demikian secara moral tahanan politik tersebut bukanlah seorang penjahat. Dia tetap mendapat predikat sebagai seorang yang bermoral.

Norma moral atau susila adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Tolok ukur penilaiannya adalah ukuran baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi atau yang dianggap rendah masyarakat

tempat manusia yang bersangkutan itu berada. Dengan norma moral itu, seseorang benar-benar dinilai perilakunya.

Norma kebiasaan adalah tolok ukur perilaku manusia yang berdasarkan pada hal-hal yang telah berlangsung dalam masyarakat sebagai suatu adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari. Misalnya kebiasaan orang bertamu itu sore hari, tidak pada siang hari. Itu berarti, apabila ada seseorang yang bertamu pada siang hari itu dipandang tidak lazim dan apabila tidak ada komitmen lebih dahulu dengan pemilik rumah, maka bisa jadi menimbulkan masalah, karena dipandang melanggar adat kebiasaan. Norma kesopanan atau sopan santun menyangkut sikap lahiriah manusia. Jika bertemu dengan orang yang lebih tua perlu menundukkan kepala, tidak baik kentut dengan suara keras, tidak baik perempuan pergi sendirian di malam hari, dan lainnya. Norma kesopanan secara lahiriah dapat juga mengungkapkan suara hati sehingga mempunyai kualitas moral, meskipun sikap lahiriah itu sendiri tidak bersifat moral. Orang yang melanggar sopan santun karena tidak mengetahui adab bersopan santun di daerah tertentu atau karena situasi, ia tidak dianggap melanggar norma moral.

Pelanggaran norma biasanya mendapatkan sanksi, tetapi tidak selalu berupa hukuman di pengadilan atau penjara. Sanksi dari norma agama lebih ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hukumannya berupa siksaan di akhirat, atau di dunia atas kehendak Tuhan. Sanksi pelanggaran/ penyimpangan norma kesusilaan adalah moral yang biasanya berupa gunjingan dari lingkungannya. Penyimpangan norma kesopanan dan norma kebiasaan, seperti sopan santun dan etika yang berlaku di lingkungannya, juga mendapat sanksi moral dari masyarakat, misalnya berupa gunjingan atau cemoohan. Begitu pula norma hukum, biasanya berupa aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku di masyarakat dan disepakati bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa norma adalah petunjuk hidup bagi warga yang ada dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat, karena norma tersebut mengandung sanksi. Siapa saja, baik individu maupun kelompok, yang melanggar norma mendapat hukuman yang berwujud sanksi, seperti sanksi agama dari Tuhan dan departemen agama, sanksi susila, kesopanan, hukum, maupun kebiasaan yang diberikan oleh masyarakat berupa sanksi moral.

#### c. Makna Moral

Pengertian moral, menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik buruk

seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas ada sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan.

Ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral, dengan tujuan membentuk watak atau karakterstik anak. Pakar-pakar tersebut di antaranya Newman, Simon, Howe, dan Lickona. Dari beberapa pakar tersebut, pendapat Lickona lebih cocok diterapkan untuk membentuk watak/ karakter anak. Pandangan Lickona (1992) tersebut dikenal dengan *educating for character* atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak anak. Dalam hal ini, Lickona mengacu pada pemikiran filsafat Michael Novak yang berpendapat bahwa watak atau karakter seseorang dibentuk melalui tiga aspek yaitu, moral knowing, moral feeling, dan moral behavior, yang saling berhubungan dan terkait. Lickona menggarisbawahi pemikiran Novak. Ia berpendapat bahwa pembentukan karakter atau watak anak dapat dilakukan melalui tiga kerangka pikir, yaitu konsep moral (moral knowing), sikap moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral behavior). Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral.

Pemikiran Lickona ini diupayakan dapat digunakan untuk membentuk watak anak, agar dapat memiliki karakter demokrasi, sehingga standar kompetensi demokrasi tercapai. Oleh karena itu, materi tersebut harus menyentuh tiga aspek, yaitu konsep moral (moral knowing) mencakup kesadaran moral (moral awareness), pengetahuan nilai moral (knowing moral value), pandangan ke depan (perspective taking), penalaran moral (reasoning), pengambilan keputusan (decision making), dan pengetahuan diri (self knowledge), (Ruminiati, 2005 : 24)

d. Hubungan Nilai, Norma, dan Moral

Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau

motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta, karena fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian, tidak bersifat konkret yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia (Kaelan, 2003: 92). Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Wujud konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai norma, dan dari berbagai macam norma tersebut, norma hukumlah yang paling kuat berlakunya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukum. Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah, maka manusia memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku.

Hubungan antara moral dan etika memang sangat erat sekali dan kadang kala keduanya disamakan begitu saja. Namun sebenarnya, kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis bagi sikap dan tindakan agar menjadi manusia yang baik. Di pihak lain, etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut (Krammer, 1988 dalam Darmodiharjo 1996). Atau juga sebagaimana dikemukakan oleh De Vos (1987), bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan identik dengan pengertian moral, sehingga etika pada hakekatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas. Setiap orang memiliki moralitas, tetapi tidak demikian dengan etika. Tidak semua

orang melakukan pemikiran secara kritis terhadap etika. Terdapat suatu kemungkinan bahwa seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis. Etika tidak berwenang menentukan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Wewenang ini dipandang sebagai pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari etika jikalau dibandingkan dengan ajaran moral. Sekalipun demikian, dalam etika seseorang dapat dipahami penyebab dan dasar manusia harus hidup berdasarkan norma-norma tertentu. Hal yang terakhir inilah yang merupakan kelebihan etika jikalau dibandingkan dengan moral. Hal itu dapat dianalogikan bahwa ajaran moral sebagai “buku petunjuk tentang memperlakukan sebuah mobil dengan baik”, sedangkan etika memberikan pengertian tentang “struktur dan teknologi mobil itu sendiri”. Demikianlah hubungan yang sistematis antara nilai, norma dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia

6. Latihan

- a. Jelaskan pengertian dan makna konsep dalam ppkn
- b. Jelaskan pengertian dan makna nilai dalam materi ppkn
- c. Jelaskan pengertian dan makna moral dalam materi ppkn
- d. Jelaskan pengertian dan makna norma dalam materi ppkn
- e. Jelaskan hubungan nilai, norma dan moral dalam materi ppkn

## 7. Referensi

- Azra, Azyumardi. 2002. "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia." Makalah dalam Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan (Civic Education) di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei
- Darmodihardjo, Dardji. 1996. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali
- Hakim, Suparlan, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Malang: Universitas Negeri Malang
- Kaelan. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2003. Pendidikan Pancasila. Yagjakarta: Paradigma
- Margono, dkk. 2002. Pendidikan Pancasila (Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sumantri, Muhammad Numan. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Sumarsono, dkk. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ubaidillah, A., dkk. 2006. Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE, UIN Syarif Hidayatullah.
- Winataputra, Udin. 2001. "Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan." Makalah dalam Lokakarya Civic Education Dosen IAIN/STAIN Se-Indonesia, Sawangan-Depok
- Yusra, Dhoni. 2006. Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Graha Ilmu.
- Zamroni. 2001. Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society. Yogjakarta : BIGRAF Publishing

8. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampuan	Tanda tangan pengampu
1				
2				
3				
4				
5				

Nilai Akhir: \_\_\_\_\_

Pengampu,



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**